

**PROGRAM KELOMPOK KERJA SOSIAL EKONOMI INDONESIA – MALAYSIA (KK SOSEK
MALINDO) DI KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA**

**INDONESIA – MALAYSIA SOCIAL ECONOMIC WORKING GROUP (KK SOSEK MALINDO) IN
WEST KALIMANTAN VIEWED BY PERSPECTIVE OF INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY**

Firman Fahrozi¹, Sutrimo Sumarlan², Thomas Gabriel Joostensz³

Abstrak - Permasalahan perbatasan bagi warga negara yang tinggal didaerah perbatasan memerlukan kerjasama antara kedua negara dalam rangka mempertahankan negara. Sebagai Negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama pengelolaan perbatasan sejak tahun 1965 melalui forum *General Borders Committee* (GBC). Sedangkan kerjasama program KK Sosek Malindo tingkat daerah terbentuk pada tahun 1985. Penelitian ini menganalisa implementasi KK Sosek Malindo dan dampak dari pelaksanaan KK Sosek Malindo di Kalimantan Barat–Sarawak terhadap *Confidence Building Measures* (CBMs), serta dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal diperbatasan. Analisa data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang ditemukan adalah implementasi KK Sosek Malindo mulai dari tingkat pusat hingga pelaksanaannya di tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak. Ditemukan pula adanya dampak positif terhadap peningkatan CBMs dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: *KK Sosek Malindo, Diplomasi Pertahanan, Confidence Building Measures*

Abstract - Border problems for citizens who live in border areas i requires cooperation between the two countries in order to defend the country. As the most closer neiighbor country of Indonesia, Malaysia bilateral cooperation with Indonesia in managing borders since 1965 through the *General Borders Committee* (GBC) forum. Mean while, one of regional-level cooperation program between Indonesia-Malaysia, and KK Sosek Malindo formed in 1985. This research aims to analyze the implementation of KK Sosek Malindo effort and the impact of the implementation KK Sosek Malindo in West Kalimantan-Sarawak on *Confidence Building Measures* (CBMs), also the impact on improving the welfare of the community on the border. Data analysis was carried out using descriptive qualitative methods The results found is the implementation of the KK Sosek Malindo from the central level to its implementation at the regional level. Also founded a positive impact on increasing CBMs and the level of welfare for Indonesian Citizens who living at border in West Kalimantan Province.

Keywords: *KK Sosek Malindo, Defense Diplomacy, Confidence Building Measures*

¹ Program Studi Diplomasi Pertahanan cohort 4 Fak. Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

² Dr. Drs. Sutrimo Sumarlan, M.M., M.Si. adalah pembimbing pertama penelitian. Prodi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan.

³ Kol. Caj. (Purn) Dr. Thomas Gabriel Joostensz, M.Si. (Han) adalah kedua penelitian. Prodi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar yang mempunyai luas wilayah baik di daratan maupun di lautan yang memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan wilayahnya. Wilayah perbatasan suatu negara adalah modal utama kedaulatan suatu negara. Perbatasan negara merupakan lokasi geografis yang berfungsi sebagai pembatas yang didefinisikan oleh suatu negara untuk menentukan teritorinya. Indonesia berbatasan langsung dari perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia di pulau Kalimantan, Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Papua Nugini (PNG) di Provinsi Papua. Sedangkan perbatasan laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Republik Palau, Australia, dan PNG.

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik perbatasan yang rawan akan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara tetangga sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Wilayah perbatasan suatu negara memang sering

menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Selama ini, Indonesia paling sering bersengketa mengenai masalah perbatasan dengan Negara Malaysia. Perbatasan negara, khususnya Indonesia–Malaysia merupakan salah satu masalah strategis yang perlu untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengarah pada ancaman–ancaman terhadap keamanan negara akibat tingginya mobilitas masyarakat antar kedua negara di sepanjang wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan lautnya.

Secara langsung maupun tidak langsung, hubungan di wilayah perbatasan mempunyai dampak penting terhadap kondisi pertahanan baik dalam skala nasional, bilateral, maupun regional. Kawasan perbatasan darat antar negara berpotensi besar bagi berkembangnya kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan dan memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah, terutama dalam hal pengembangan industri,

perdagangan dan pariwisata. Hal tersebut tentu menjadi suatu peluang besar bagi peningkatan kegiatan produksi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat perbatasan itu sendiri. Masyarakat perbatasan pada umumnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kegiatan lintas batas tersebut. Selain karena faktor kesatuan masyarakat yang memang sudah berinteraksi lama dari sebelum pembentukan batas negara.

Perbatasan negara, khususnya Indonesia–Malaysia merupakan salah satu masalah strategis yang perlu untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengarah pada ancaman–ancaman terhadap keamanan negara akibat tingginya mobilitas masyarakat antar kedua negara di sepanjang wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan lautnya.

Terdapat dua inti permasalahan besar di kawasan perbatasan darat Indonesia–Malaysia, yakni menyangkut kedaulatan bangsa dan negara, kemudian masalah kepentingan

masyarakat perbatasan itu sendiri. Permasalahan *pertama*, mengenai kedaulatan bangsa dan negara lebih banyak didasarkan pada kasus tapal batas yang sering bergeser dari titik koordinat yang sebelumnya telah disepakati bersama. Pergeseran atas wilayah negara menjadi permasalahan yang cukup krusial. Beberapa kali hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas disebabkan oleh persengketaan tapal batas yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan permasalahan *kedua*, menyangkut kepentingan masyarakat perbatasan disebabkan oleh ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan Kalimantan Barat. Permasalahan sosial ekonomi ini akan merambat kepada permasalahan melunturnya rasa nasionalisme sebab melihat tingginya jaminan sosial bagi kehidupan masyarakat negara tetangga.

Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang memiliki Jalur Lintas darat terbanyak dengan Malaysia. Terdapat 13 Pos Lintas Batas (PLB) disepanjang perbatasan darat Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia). Salah satu isu strategis prioritas pembangunan di Kalimantan Barat

adalah infrastuktur, karena Infrastruktur diperkirakan dapat memberikan kemudahan di setiap daerah-daerah untuk berkembang dan memudahkan investor masuk. Pemerintah Kalimantan Barat melakukan pembahasan di setiap tingkat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari desa, kecamatan, daerah, hingga pra musrembang tingkat provinsi dan akan dibawa ke pemerintah pusat.

Selain mengupayakan isu pembangunan, pemerintah Kalimantan Barat juga membuat kesepakatan kerjasama di bidang Sosial Ekonomi daerah perbatasan Malaysia dan Indonesia (Sosek Malindo). Hal ini sebagai upaya pemerintah guna mempercepat pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan untuk mensejahterakan kehidupan warga negara Indonesia yang tinggal diperbatasan darat Indonesia–Malaysia yang memiliki masalah disparitas sosial.

Pada awalnya pogram kerjasama Sosek Malindo dibentuk dalam sidang *General Border Committee* (GBC) ke-12 pada tanggal 14 Nopember tahun 1983. Sedangkan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia–Malaysia (KK Sosek Malindo) tingkat daerah di Kalimantan

Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.⁴

KK Sosek Malindo tingkat pusat berkedudukan di Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia (Ster TNI) yang diketuai oleh Asisten Teritorial Panglima TNI (Aster Panglima TNI) yang bersekretariat di Markas Besar TNI (Mabes TNI). Sedangkan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat dan diketuai oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua KK Sosek Malindo tingkat daerah

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan (Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, 2003).

Kalimantan Barat.⁵ Berdasarkan struktur tersebut, Kelompok Kerja Sosek Malindo merupakan staf tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada *General Borders Committee* (GBC) melalui *Staff Planning Committee* (SPC). Sedangkan Kelompok Kerja Sosek Malindo tingkat daerah kedudukannya adalah sebagai pembantu KK Sosek Malindo tingkat pusat dengan tugas pokok mengkaji secara detil kerjasama sosial ekonomi di daerah/negeri dan memantau pelaksanaannya sesuai dengan arahan KK Sosek Malindo tingkat pusat.

Berdasarkan struktur tersebut, Kelompok Kerja Sosek Malindo merupakan staf tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada GBC melalui SPC. Sedangkan Kelompok Kerja Sosek Malindo tingkat daerah kedudukannya adalah sebagai pembantu KK Sosek Malindo tingkat pusat dengan tugas pokok mengkaji secara detil kerjasama sosial ekonomi di daerah/negeri dan memantau pelaksanaannya sesuai dengan arahan KK Sosek Malindo tingkat pusat.

Melalui program KK Sosek Malindo, hubungan diplomatik bilateral

antara Indonesia dan Malaysia dalam kerjasama membangun wilayah perbatasan darat kedua negara menjadi salah satu diplomasi yang mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan antar kedua negara serumpun ini. Pelaksanaan program KK Sosek Malindo juga dapat menjadi peredam dari berbagai perselisihan yang sering terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, bahasan pokok dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengalisa implementasi program KK Sosek Malindo mulai dari tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan hingga pelaksanaan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia sebagai upaya penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia mengenai perbatasan negara khususnya di wilayah perbatasan negara di Prov. Kalimantan Barat.
2. Menganalisa pengaruh dari program KK Sosek Malindo yang merupakan bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam meningkatkan rasa saling percaya (CBMs) dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah-

⁵ *Ibid.* hlm. 102-103

wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Karena secara garis besar, diplomasi pertahanan dikategorikan menjadi 3 hal utama yang salah satunya adalah (*Defense Diplomacy for Confidence Building Measures*) diplomasi pertahanan untuk meningkatkan rasa saling percaya. Sedangkan peningkatan kesejahteraan merupakan tujuan awal dari pelaksanaan KK Sosek Malindo itu sendiri.

KAJIAN TEORITIK

Dalam teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Krasner terdapat dua akar teori yang cukup penting, yaitu realisme struktural dan pendekatan isu. Realisme struktural lebih banyak membahas masalah kapabilitas unit-unit yang dimiliki negara agar dapat bekerja sama dengan baik dalam rezim. Sementara pendekatan isu membahas posisi negara yang terus berubah sesuai dengan isu yang dibahas dalam rezim. Negara memiliki posisi yang berbeda dalam setiap isu tergantung pada pengaruh negara yang bersangkutan dalam isu tersebut. Untuk itu pembahasan mengenai struktur program KK Sosek Malindo akan diuraikan melalui pendekatan realisme struktural yang

lebih relevan. Selain itu dalam pelaksanaan program KK Sosek Malindo, kedua negara anggota memiliki satu isu yang sama yaitu kesejahteraan di kawasan perbatasan sehingga akan kurang relevan jika menggunakan pendekatan isu.

Setiap masyarakat Internasional memerlukan interaksi yang tidak hanya bergerak ke internal negara mereka saja, akan tetapi juga memerlukan adanya saling keterkaitan antara masyarakat negara tetangga. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal dikawasan perbatasan darat suatu negara yang memiliki keterkaitan suku dan ras dan kesamaan lainnya. Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan dan kepentingan. Begitu juga dalam meningkatkan kualitas kehidupan suatu negara dan menjaga kedaulatannya dari berbagai ancaman hingga dapat tetap stabil, pasti akan melakukan interaksi dengan negara lain, salah satunya berupa kerjasama.

Kerjasama antar negara membuktikan adanya suatu interaksi internasional, seperti halnya hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia–Malaysia. Sebagai negara yang bertetangga interaksi antara kedua

negara sangat diperlukan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan kedua negara di Kalimantan, terlebih lagi daerah ini terdapat perbatasan darat yang membuat interaksi kedua negara semakin intens dilakukan. Interaksi yang semakin intens antara masyarakat kedua negara secara langsung maupun tidak langsung memicu terjadinya berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga pengelolaan dan pengentasan permasalahan yang ada harus segera dilakukan. Persoalan perbatasan yang semakin kompleks, mendorong kedua negara untuk membentuk sebuah forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral berupa program KK Sosek Malindo yang merupakan salah satu bentuk rezim internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua negara demi membangun dan mensejahterakan wilayah perbatasan negara masing-masing.

Diplomasi pertahanan pada hakikat awalnya merupakan konsep yang ditujukan dalam ruang lingkup politik internasional maupun militer. Diplomasi Pertahanan diintegrasikan sebagai instrumen militer dan praktek diplomatik suatu negara terhadap masalah-masalah

pertahanan dan keamanan negara terkait pencegahan konflik, mengelola krisis, dan potensi perselisihan dengan negara lain. Diplomasi pertahanan digunakan negara tidak hanya dalam rangka kerjasama militer, melainkan juga untuk mempengaruhi sistem atau doktrin pertahanan negara lain dilakukan melalui cara *soft power*. Konsep diplomasi pertahanan merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan nasionalnya.

Diplomasi pertahanan suatu negara memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

1. *Defense diplomacy for Confidence Building Measures (CBMs)*

Tujuan dari pelaksanaan *Confidence Building Measures (CBMs)* adalah untuk membangun hubungan baik dan meningkatkan rasa saling percaya antara satu negara dengan negara yang lainnya. Membangun rasa saling percaya ini utamanya dilakukan untuk memperkecil, menghindari dan menghilangkan terjadinya mispersepsi dan kesalahpahaman antar negara atau juga bertujuan untuk menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka

dalam kebijakan negara, saling transparansi dalam pengembangan kemampuan agar apa yang sedang dan telah dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lainnya.

2. *Defense Diplomacy for Defense Capabilities*

Karakter diplomasi pertahanan yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan adalah pembangunan kapabilitas (*capacity building*). Pengembangan kemampuan atau kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara-negara karena sistem internasional yang bersifat anarki dimana tidak ada kekuasaan atau otoritas aktor yang lebih kuat daripada negara itu sendiri. Adapun diplomasi dalam tatanan ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial. Kegiatan diplomasi pertahanan dalam tatanan *capacity building* ini, antara lain seperti usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer, kredit ekspor, pembelian alutsista, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk membangun kapabilitas pertahanan negara.

3. *Defense Diplomacy for Defense Industry*

Kegiatan diplomasi pertahanan mengenai industri pertahanan bertujuan untuk pembangunan dan penguatan industri pertahanan suatu negara. Cara ini dilaksanakan melalui kerjasama strategis antar negara dalam mempromosikan, pengembangan dan penelitian, investasi dan produksi alat peralatan, persenjataan, dan kendaraan militer. Mengingat kerjasama industri pertahanan membutuhkan berbagai macam keahlian dan keterampilan, maka banyak negara-negara yang melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan cara *Transfer of Technology* (ToT) dan *Transfer of Knowledge* (ToK).⁶

Kerjasama internasional dalam bidang pertahanan atau diplomasi pertahanan dilaksanakan untuk membangun dan memelihara *Confidence Building Measures* (CBMs). Tindakan membangun kepercayaan secara luas didefinisikan sebagai tindakan yang membahas, mencegah, atau mengatasi peningkatan permusuhan dan membangun rasa saling percaya antar negara. Bentuk kerjasama CBMs bisa dilakukan secara formal atau informal,

⁶ Idil Syawfi, "Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan -Tujuan Pertahanan Indonesia", *Tesis Magister*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 28.

unilateral, bilateral, maupun multilateral, militer atau politik, dan dapat dilakukan oleh *state to state* atau non pemerintah. CBMs relevan dalam menangani dan bekerja menuju resolusi kemandekan politik jangka panjang. Tindakan membangun kepercayaan atau CBMs dikembangkan antara aliansi militer selama Perang Dingin untuk menghindari serangan nuklir oleh kecelakaan dan telah melebar ke daerah lain baik dalam aspek militer dan non militer. Pertama kali disusun dari dalam konteks manajemen konflik Eropa di tahun 1970-an, konsep CBMs termasuk militer, budaya, dan pertukaran sosial, dan telah diterapkan untuk konflik di seluruh dunia.⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan teori metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kelebihan penggunaan metode kualitatif adalah peneliti dapat mendeskripsikan secara komprehensif, urut serta runut dan berjalan secara mendalam. Dimana

penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program KK Sosek Malindo mulai dari tingkat teknis di daerah hingga ke tingkat pusat dan menganalisa dampak dari pelaksanaan KK Sosek Malindo terhadap peningkatan rasa saling percaya (CBMs) dan peningkatan kesejahteraan Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan negara di Prov. Kalimantan Barat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara (*in depth interview*) dan studi literatur (*desk research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama antar negara membuktikan adanya suatu interaksi internasional, seperti halnya hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia–Malaysia. Sebagai negara yang bertetangga interaksi antara kedua negara sangat diperlukan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan kedua negara di Kalimantan, terlebih lagi daerah ini terdapat perbatasan darat yang membuat interaksi kedua negara semakin intens dilakukan. Interaksi yang semakin intens antara masyarakat kedua negara secara langsung maupun tidak langsung

⁷ Bonnie Glaser S, “*Confidence-Building Measures. Center for Strategic and International Studies*”, Washington DC, 2015) dalam <http://csis.org/programs/international-security-program/asia-division/cross-strait-security-initiative-/confidence> diakses pada 02 September 2018.

memicu terjadinya berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga pengelolaan dan pengentasan permasalahan yang ada harus segera dilakukan. Persoalan perbatasan yang semakin kompleks, mendorong kedua negara untuk membentuk sebuah forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral berupa program KK Sosek Malindo yang merupakan salah satu bentuk rezim internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua negara demi membangun dan mensejahterakan wilayah perbatasan negara masing-masing.

Perjanjian kerjasama perbatasan yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dimulai dengan dalam kerjasama dibidang keamanan sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai pengaturan dalam bidang keamanan daerah-daerah perbatasan ini direvisi untuk pertama kali pada tahun 1972, dan kemudian revisi kedua pada tahun 1984. Dalam revisi yang kedua tersebut kerjasama perbatasan Indonesia–Malaysia diperluas hingga mencakup berbagai jenis bidang kerjasama yaitu, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Menindak lanjuti kesepakatan tersebut, Ketua Bersama *General Border*

Committee (GBC) Indonesia–Malaysia (Malindo), telah membentuk satu kelompok kerja baru di lingkungan GBC Malindo yaitu Kelompok Kerja Bidang Sosial – Ekonomi (KK Sosek Malindo). Demi keefektifan dan lebih efisiennya penyelenggaraan, maka dikuasakanlah kewenangan program KK Sosek Malindo kepada pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni; Kalimantan Barat-Sarawak, Kalimantan Utara-Sabah, Riau-Malaka-Johor Bahru.

Pertemuan KK Sosek Malindo dilaksanakan setiap tahunnya dimulai dari KK Sosek Malindo tingkat daerah, kemudian KK Sosek Malindo tingkat pusat, hingga akhirnya dibawa dalam pertemuan tingkat tertinggi yakni GBC. KK Sosek Malindo sendiri sudah berjalan selama 34 tahun yang dimulai pada tahun 1984 yang memang lebih terperinci membahas sosial dan perekonomian diperbatasan kedua negara. Sedangkan pertemuan GBC yang merupakan induk dari forum kerjasama mengenai perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sudah lebih lama berjalan yang dimulai semenjak tahun 1964.

KK Sosek Malindo saat ini sudah mengalami penyederhanaan

pembahasan dari sebelumnya sebanyak 8 bidang isu pembahasan, kini menjadi 3 bidang isu, yakni; *pertama*, bidang kerjasama sosial budaya, *kedua*, bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan, *ketiga*, bidang keamanan dan kepengurusan perbatasan. Dalam setiap pertemuan KK Sosek Malindo, membahas isu-isu yang sudah tercantum dalam kertas kerja.

Dalam konteks hukum internasional, pertanggungjawaban dalam kerjasama internasional tetap berada di pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi KK Sosek Malindo yang terdiri dari dua tingkat yaitu tingkat pusat dan daerah. KK Sosek Malindo tingkat pusat saat ini berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kementerian Dalam Negeri dari yang sebelumnya dikuasakan kepada Kementerian Pertahanan dan Asisten Teritorial Panglima TNI pada awal terbentuknya KK Sosek Malindo. Sedangkan KK Sosek Malindo Tingkat Daerah Kalimantan Barat saat ini menjadi dipertanggungjawabkan pada Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat setelah mengalami beberapa pemindahan kewenangan mulai dari

Badan Pembangunan Perbatasan Desa Tertinggal (BP2DT) hingga dibubarkannya instansi tersebut, yang kemudian beralih ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, hingga kemudian kewenangan tersebut baru ditugaskan kepada Biro Pemerintahan semenjak tahun 2016 silam.

Kelompok Kerja Sosek Indonesia tingkat daerah di Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999.

Perubahan-perubahan lembaga dan instansi yang berwenang dalam menangani program ini baik dari tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah menjadi salah satu kendala teknis dalam pelaksanaan KK Sosek Malindo bagi Indonesia. Selain pergantian kewenangan lembaga dan

instansi yang melaksanakan, individu yang menjadi pejabat berwenang juga kerap kali mengalami pergantian sehingga diperlukan adanya penyesuaian baru dalam setiap pergantian. Berbanding terbalik dengan struktur pemerintahan Malaysia yang jarang sekali mengalami perubahan struktural dan bahkan hingga individu yang menangani program KK Sosek Malindo tersebut. Perbedaan struktur organisasi yang berwenang antara pemerintah Indonesia dan Malaysia cukup menyulitkan pemerintah Indonesia sendiri dalam menyusun *counterpart-counterpart* untuk menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Malaysia.

Selama ini kerjasama bilateral KK Sosek Malindo masih dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang sesuai dengan bagian dan struktur lembaga yang berwenang dalam menangani program ini. Pelaksanaan program ini masih belum melibatkan pihak-pihak dari luar pemerintah, padahal keterlibatan pihak ketiga ini sesuai dengan konsep *open diplomacy* dan *new diplomacy* yang memang memberikan ruang yang luas kepada pihak-pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam berdiplomasi.

Pada dasarnya, diplomasi sendiri merupakan suatu alat politik luar negeri suatu negara sebagai upaya pemerintah dalam mengelola hubungan dengan negara lain. Akan tetapi, dalam perkembangan konsep-konsep diplomasi yang merupakan jalu komunikasi dan ide-ide mengenai demokrasi semakin meluas. Peran aktor-aktor yang bukan dari pemerintahan (*non state actors*) juga memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan diplomasi itu sendiri. Diplomasi memang menjadi sebuah upaya yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Namun, diplomasi memiliki keterkaitan erat dengan manajemen hubungan antara aktor negara dan aktor-aktor selain negara.⁸

Kegiatan KK Sosek Malindo tingkat daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan rasa saling percaya (CBMs) antar negara membuahkan dampak yang positif dalam setiap perkembangannya. Menurut Amitav Acharya, kerjasama internasional dalam aktivitas diplomasi pertahanan dalam rangka meningkatkan rasa saling percaya (CBMs) bertujuan untuk

⁸ Minix, Dean dan Sandra M. Hawley, *Global Politics*, (Belmonth: Wadsworth Publishing Company), hlm. 282.

menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka dalam kebijakan negara, saling transparansi dalam pengembangan kemampuan agar apa yang sedang dan telah dilakukan suatu negara tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara lainnya.⁹ Konsep diplomasi pertahanan lebih sering menggunakan metode win-win solution dengan cara yang lebih soft power untuk membangun kemitraan dengan semua pihak secara transparansi atau keterbukaan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan bagi pihak lain. Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan yang baik, lebih jauh lagi dapat saling melakukan kerjasama, dan yang terpenting adalah dapat meningkatkan kepercayaan.¹⁰ Dalam konsep diplomasi pertahanan, ada

tiga karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara. Adapun ketiga konsep tersebut, yaitu; *Defense Diplomacy for Confidence Building Measures (CBMs)*, *defense Diplomacy for Defense Capabilities*, dan *Defense Diplomacy for Defense Industry*.¹¹

Dalam diplomasi pertahanan untuk membangun/ meningkatkan rasa saling percaya (CBMs), pada prinsipnya dalam tataran negara bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepercayaan antar kedua belah pihak negara, menjaga hubungan baik kedua negara, dan mengurangi perasaan terancam akan adanya mispersepsi dan konflik, serta merupakan usaha penyelesaian suatu konflik secara damai. Secara operasional, diplomasi pertahanan dalam rangka CBMs ini dapat dilakukan melalui kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, pertukaran informasi strategis, mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, pertukaran perwira dalam pendidikan militer, latihan bersama, kesepakatan dalam kerjasama atau nota kesepahaman. Keberhasilan hubungan diplomasi pertahanan yang

⁹ L.A. Swatuk, L. d., "Regional Approaches to Security In The Third World dalam The South at the End of the Twentieth Century" dalam Pergeseran KEkuatan di Asia Timur dan Konsekuensi bagi ASEAN; Persepsi Ancaman dan Kerjasama Keamanan Regional, 2013, Analisis CSIS. hlm. 343.

¹⁰ Rodon Pedrason, *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community*, Unpublished Dissertation (Heidelberg: Universitat Heidelberg. 2015), hlm. 15.

¹¹ Cottey, Andrew dan Anthony Forster, *Chapter 1: Strategic Engagement: Defense Diplomacy as a means of Conflict Prevention*, (New York: Routledge, 2004), hlm. 15.

baik dalam hal CBMs tentunya akan membentuk kondisi lingkungan yang saling mempercayai antar pihak tanpa saling mencurigakan.

Dalam pelaksanaan KK Sosek Malindo, terbukti bahwa kegiatan ini membawa efek positif dalam membangun rasa saling percaya (CBMs) antara Indonesia dan Malaysia. Program KK Sosek Malindo merupakan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin baik ditingkat pusat maupun di daerah. Sebagai negara bertetangga yang banyak memiliki persamaan, tak jarang Indonesia dan Malaysia mengalami berbagai ketegangan dalam berbagai hal. Walaupun demikian, pertemuan KK Sosek Malindo terus berjalan secara konsisten setiap tahunnya demi membahas tujuan-tujuan bersama dalam membangun wilayah perbatasan antar kedua negara. Bahkan, pertemuan KK Sosek Malindo di tingkat daerah menjadi forum yang paling rutin mengadakan pertemuan secara rutin dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kerjasama bilateral lainnya antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa KK Sosek Malindo telah berhasil menumbuhkan dan meningkatkan rasa

saling percaya (CBMs) antar kedua negara ini.

Keberhasilan KK Sosek Malindo dalam meningkatkan rasa saling percaya (CBMs) tidak hanya dilevel antar pemerintah saja (*Government to Government*), akan tetapi dampak adanya peningkatan CBMs juga turut dirasakan dilevel masyarakat (*people to people*). Interaksi masyarakat kedua negara, khususnya dalam hal sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan juga tetap berlangsung sebagaimana biasanya walaupun keadaan dilevel pemerintah pusat terkadang sering bersitegang.

Selain adanya peningkatan CBMs antara Indonesia dan Malaysia, keberlangsungan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak juga memberikan dampak positif terhadap adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Kalimantan Barat menunjukkan bahwa

WNI yang tinggal Kab. Sanggau memiliki peningkatan pendapatan perkapita tertinggi diantara Kabupaten lainnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena PLBN Entikong Kab. Sanggau lebih dominan dimanfaatkan sebagai jalur lintas keluar masuk negara jika dibandingkan dengan Pos Lintas di daerah lainnya.

Data lain yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Prov. Kalimantan Barat secara keseluruhan adalah besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh pengeluaran, dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Jika makin besar proporsinya, maka menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan penduduk. Begitu pula sebaliknya, jika proporsi tersebut mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan penduduk menurun (Hukum Engle). Adapun pengeluaran rata-rata penduduk Kalimantan Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan daerah Kalimantan Barat pada tahun 2017 sebesar Rp 1.186.868,- per kapita sebulan

lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp 848.388,- proporsinya sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan 51,50% dan pengeluaran non makanan 48,50%.¹²

Selama ini, masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat lebih dominan menggantungkan hidup kepada Malaysia. Mulai dari bahan makanan, kebutuhan sandang, kesehatan, dan bahkan hiburan sekalipun. Akan tetapi, saat ini keadaan tersebut sudah mulai berubah. Kemajuan pembangunan dan perkembangan di wilayah perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia, telah mengubah ketergantungan hidup masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan terhadap Malaysia. Alasan akses jalan dan pembangunan infrastruktur menjadi faktor utama keberlangsungan hidup tersebut selama bertahun-tahun.

KESIMPULAN

Dalam implementasi program Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia–Malaysia (KK Sosek Malindo)

¹² Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2018, hlm. 33.

di Kalimantan Barat, Kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang terkait dengan persoalan perbatasan telah dimulai sejak tahun 1967 yang dimulai dalam bidang keamanan di daerah-daerah perbatasan kedua negara. Kerjasama inipun kemudian berkembang hingga mencakupi bidang-bidang lain seperti: politik, sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, terbentuklah forum *General Border Committee* (GBC) yang merupakan induk kerjasama antar kedua negara yang kemudian bersepakat untuk membentuk program kelompok-kelompok kerja sehingga melahirkan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK Sosek Malindo).

Dari mulai terbentuknya forum GBC hingga sampai dengan saat ini masih dikomandoi Kementerian Pertahanan yang bersekretariat di Dit. Kerjasama Internasional Ditjen. Strategi Pertahanan. Sedangkan untuk kepengurusan KK Sosek Malindo tingkat pusat su 80 mengalami perpindahan kewenangan dari yang sebelumnya dibawah kewenangan Asisten Teritorial Panglima TNI dialihkan kepada Kementerian Pertahanan hingga kemudian

diamanahkan ke Kementerian Dalam Negeri yang bersekretariat di Dirjen. Biro Administrasi Kewilayahan (BAK). Demikian pula dengan lembaga pelaksana KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak saat ini bersekretariat di Biro Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat dari yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh BP2DT dan Bappeda Prov. Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah tingkat daerah Prov. Kalimantan Barat dan pemerintah Sarawak Malaysia selalu mengadakan pertemuan rutin untuk mengenai KK Sosek Malindo disetiap tahunnya. Adapun isu-isu yang diperundingkan dalam pertemuan tersebut selalu sesuai dengan kertas kerja yang terlebih dahulu dibahas oleh tim teknis yang sesuai dengan kedinasan/lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan bidang isu yakni antara lain pembahasan dalam bidang kerjasama sosial budaya, bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan, serta bidang keamanan dan kepengurusan perbatasan. Keseluruhan implementasi KK Sosek Malindo ini dilaksanakan oleh pemerintah saja (*state actors*) dan masih belum

melibatkan aktor-aktor selain negara (*non state actors*).

Implementasi program KK Sosek Malindo yang merupakan salah satu bentuk kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia yang dapat meningkatkan rasa saling percaya (CBMs) dan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Adanya peningkatan rasa saling percaya (CBMs) antara Indonesia dan Malaysia melalui program KK Sosek Malindo dibuktikan dengan selalu terselenggaranya pertemuan rutin tahunan KK Sosek Malindo tingkat daerah Kalimantan Barat–Sarawak semenjak dari pertama terbentuk hingga saat ini. Pertemuan yang konsisten antara perwakilan pemerintah Prov. Kalimantan Barat dan Pejabat Kuasa Negeri Sarawak yang merupakan pelaksana KK Sosek Malindo tingkat daerah setiap tahunnya selalu berjalan baik membahas perkembangan dan rencana-rencana kegiatan ke depan yang berkelanjutan sesuai dengan kertas kerja walaupun hubungan antara Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan memanas di level pemerintah pusat. Dengan demikian, KK Sosek Malindo tingkat daerah menjadi pertemuan yang paling konsisten dilaksanakan diantara

semua kegiatan kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia.

Selain peningkatan CBM, program KK Sosek Malindo juga mempengaruhi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kalimantan Barat khususnya di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Ditambah dengan kebijakan program Nawacita pemerintah pusat yang membangun Indonesia dari pinggiran menjadikan pembangunan dan kesejahteraan semakin merata sehingga kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Sehingga Warga Negara Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan negara tidak menggantungkan hidupnya dari negara tetangga lagi.

REKOMENDASI

1. Rekomendasi Teoritis

Rekomendasi teoritis yang peneliti sarankan untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya penelitian lebih dalam dan kompleks mengenai kegiatan-kegiatan mulai dari *General Border Committee (GBC), Staff*

Planning Committee (SFC), KK Sosek Malindo tingkat pusat, dan KK Sosek Malindo tingkat daerah dari ketiga Provinsi yang bersangkutan agar dapat dilakukan analisa dan evaluasi mengenai implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga nantinya dapat menyiapkan rencana kegiatan selanjutnya yang berkelanjutan (*sustainable*). Dalam bidang disiplin ilmu pertahanan, diharapkan dapat melakukan kajian-kajian ilmiah dari berbagai perspektif ilmu pertahanan, sehingga kajian teoritis mengenai pelaksanaan KK Sosek Malindo menjadi lebih komprehensif dalam berbagai bidang pertahanan.

Hasil-hasil penelitian dari berbagai perspektif disiplin ilmu tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan analisa saran dan rencana yang konstruktif terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia ke depan. Rekomendasi teoritis tentunya sangat diharapkan untuk dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam berbagai bidang disiplin ilmu dalam dunia akademis.

2. Rekomendasi Praktik

Dalam rekomendasi praktik, peneliti memberikan saran terhadap

pelaksanaan program KK Sosek Malindo untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Saran Kepada Pemerintah Tingkat Pusat

Peran pemerintah pusat yang dalam hal ini dikuasakan dibawah Kementerian Pertahanan selaku koordinator pelaksanaan *General Border Committee* (GBC) sebagai induk dari program-program Kelompok Kerja harus dapat mengkoordinir lembaga-lembaga dan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang bernaung dibawah GBC. Kesenambungan gagasan dan isu-isu yang terkait, serta penyelarasan program-program kegiatan sangat diperlukan sehingga setiap pertemuan tahunan dengan pihak Malaysia menghasilkan program lanjutan yang *sustainable*. Karena dalam pelaksanaan kerjasama internasional, pemerintah pusat menjadi penanggung jawab seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan walaupun pelaksanaan diplomasi tersebut juga dilakukan pemerintah daerah.

Diperlukan adanya konsistensi bagi birokrat yang menangani

sehingga dapat memahami latar belakang dan keberlangsungan dari perkembangan-perkembangan dari setiap pertemuan kegiatan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, birokrat Indonesia yang ditunjuk menjadi diplomat juga harus dapat meningkatkan kemampuan diplomasi dan bernegosiasi demi tercapainya kepentingan nasional Indonesia.

b. Saran kepada Pemerintah Tingkat Daerah

Terkait dengan kedudukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka perlu adanya penambahan substansi kedudukan Pemerintah Daerah dalam kerjasama internasional. Dengan harapan akan dapat memperjelas kedudukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama internasional mengingat kerjasama internasional yang dilakukan daerah dilakukan atas

nama negara yang merupakan bagian dari negara kesatuan.

Dalam pelaksanaan program KK Sosek Malindo Kalimantan Barat–Sarawak, pemerintah daerah dapat mengkoordinir dan melibatkan semua lembaga, instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak-pihak swasta, akademisi dan berbagai aktor-aktor selain negara (*non state actors*) lainnya yang terkait dengan isu-isu pembahasan dalam setiap pertemuan KK Sosek Malindo Kalimantan Barat–Sarawak. Sehingga kegiatan-kegiatan diplomatik bagi Indonesia dan Malaysia lebih efektif dan efisien. Selain itu, secara birokrasi pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan delegasi pejabat yang mempunyai kredibilitas yang mumpuni dalam berdiplomasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hawley, Sandra M. at al. 1998. *Global Politic*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Cottey, Andrew and Forster, Anthony. 2004. *Chapter 1: Strategic Engagement: Defense Diplomcy as a means of Conflict Prevention*. New York: Routledge.

Jurnal

Glaser S, Bonnie. 2015. "Confidence-Building Measures. Center for Strategic and International Studies". Washington DC. Dalam <http://csis.org/programs/international-security-program/asia-division/cross-strait-security-initiative-/confidence>. diakses pada 02 September 2018.

L.A. Swatuk, L. d. 2013. "*Regional Approaches to Security In The Third World dalam The South at the End of the Twentieth Century*" dalam Pergeseran KEkuatan di Asia Timur dan Konsekuensi bagi ASEAN; Persepsi Ancaman dan Kerjasama Keamanan Regional. Analisis CSIS.

Tesis/Disertasi

Pedrason, Rodon. 2015. "Asean's Defence Diplomacy: The Road To Southeast Asian Defence Community". *Unpublished Dissertation* Heidelberg: Heidelberg University.

Syawfi, Idil. 2009. "Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia". *Tesis*

Magister. Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Peraturan

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2018. *Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018*.

Bappenas. 2003. *Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional*. Jakarta.

3



Firman Fahrozi

10.07 (12 menit y

Pada tanggal Jum, 1 Mar 2019 pukul 09:50 Hary Agus <haryagus20@gmail.com> menulis: Yth. Sdr. Firman Fahrozi, Terima kasih atas kiriman pe

+



Hary Agus

10.13 (7 menit yang lalu) ↕

ke saya ▾

Yth. Sdr. Firman Fahrozi,

Terima kasih atas kiriman perbaikan ketiga naskah jurnal dari Saudara SUDAH KAMI TERIMA.

Demikian sebagai salah satu syarat kelulusan.

Catatan: Format penulisan jurnal berbeda dengan penulisan Tesis, sehingga bagian Kajian Teoritik pada halaman 6 bukanlah Sub-Bab yang dipisah

...

↩ Balas

➡ Teruskan

untuk Gmail.

Oke

Lain kali

✕